

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR
BERSIH DALAM RANGKA PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GAMBIR KOTA
TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

DETI PRATIWI
NPM : 1503100062

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : DETI PRATIWI
NPM : 1503100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH
DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PASAR GAMBIR KOTA TEBING TINGGI

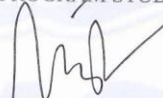
Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



SYATRUDIN, S.Sos, M.H

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : DETI PRATIWI
NPM : 1503100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM
PENGUJI II : Drs. H. A. HIDAYAH DLT, M.Si
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

()
()
()

PANITIA UJIAN

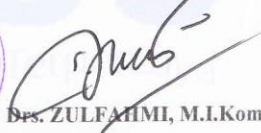
Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya -DETI PRATIWI, NPM 1503100062, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan esuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang Menyatakan

DETI PRATIWI

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GAMBIR KOTA TEBING TINGGI

Oleh :

DETI PRATIWI

1503100062

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pekerja di sektor informal, oleh sebab itu PKL juga perlu untuk di perdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempa-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan. Dalam hal ini perlu adanya penertiban PKL oleh Satpol PP sebagai aparat yang di berikan wewenang dalam menegakkan Perda tentang PKL diharapkan mampu menata PKL agar berdagang di tempat yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban pedagang kaki lima di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi sudah berjalan efektif namun masih ada beberapa kendala berupa kurang kuatnya sanksi yang diberikan kepada para pedagang kaki lima yang masih juga berjualan di trotoar atau bahu jalan walaupun sudah diberikan pemahaman berupa pertemuan dan sosialisasi antara petugas Satpol PP dengan para pedagang kaki lima, sehingga untuk mewujudkan harapan agar kawasan pasar Gambir kembali ke fungsi yang sebenar-benarnya masih belum dapat dicapai.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Program Kerja, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Medan Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya **Ayahanda tercinta Chaidir Mustafa dan Ibunda tersayang Listiani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil**. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Syafruddin S.Sos selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh , S.Sos., MSP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
7. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu member penjelasan mengenai program yang diteliti.

9. Kepada para Sahabat-sahabatku (Dinda Mutiara Syahputri, Andy Lala, Sheila Pratiwi, Khoirunnisa Nst, Julita Dewi) dan rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara .
10. Kepada orang terdekat saya (Abdillah Dicky Pratama & Ibu Deslianti) yang selalu membantu dan mendukung di dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Amiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis



IDETI PRATIWI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS.....	10
2.1 Pengertian Efektivitas	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas Program Kerja	11
2.2 Pengertian Pelaksanaan	11
2.3 Pengertian Program	13
2.4 Pengertian Pasar	13
2.5 Pengertian Pedagang Kaki Lima	14
2.6 Kinerja Satpol PP	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep	26
3.3 Definisi Konsep	26
3.4 Kategorisasi Penelitian	27
3.4.1 Adanya Tujuan Pelaksanaan Program Kerja	27
3.4.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan(prosedur) dalam melaksanakan kegiatan.....	27
3.4.3 Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan.....	27
3.4.4 Adanya Kinerja	27
3.5 Narasumber	27
3.5.1 Kabid Penegak Perda Dan perwa	27
3.5.2 Staff Satuan Satpol PP Kota Tebing Tinggi.....	28
3.5.3 Pengutip Retribusi Pasar	28
3.5.4 Para Pedagang Kaki Lima.....	28
3.5.5 Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian	32
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46

4.1.1 Penyajian Data	47
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	49
4.2.1 Adanya Tujuan Pelaksanaan Program Kerja Pasar Bersih	50
4.2.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan (Prosedur) Dalam Pelaksanaan Program Kerja	57
4.2.3 Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan	61
4.2.4 Adanya Kinerja	64
4.3 Pembahasan	68
4.3.1 Adanya Tujuan Pelaksanaan Program Kerja Pasar Bersih	68
4.3.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan (Prosedur) Dalam Pelaksanaan Program Kerja	69
4.3.3 Adanya Rencana Sesuai Dengan Pelaksanaan	70
4.3.4 Adanya Kinerja	71
BAB V PENUTUP	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Umur	48
Tabel 4.3 Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Tebing Tinggi yang berjarak \pm 80 Km dari Medan berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai kegiatan pelayanan umum di bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan penyediaan serta perdagangan. kegiatan perdagangan di Kota tebing tinggi dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Salah satu lokasi yang menjadi pusat Perdagangan tradisional maupun modern adalah kawasan Pasar gambir kota Tebing Tinggi. Kawasan ini tidaklah asing bagi masyarakat Tebing Tinggi. Pasar gambir ini adalah tempat untuk sebagian orang yang bergantung hidupnya dari berdagang, terutama Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit, berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dengan berdagang, masyarakat dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sebab inilah lapangan kerja informal menjadi pilihan satu satunya yaitu yang di namakan pedagang kaki lma (PKL). Munculnya PKL bagai cendawan di musim hujan di saat naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok ini (PKL) mencoba mengais rezeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah

ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan. Usaha tersebut dilaksanakan pada tempa-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan.

Disepanjang jalan Iskandar Muda tepatnya di pasar gambir kota Tebing Tinggi dapat dengan mudah dijumpai pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam barang, mulai dari peralatan rumah tangga, sembako, mainan anak dan masih banyak lagi. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta meningkatkan ekonomi untuk menuju kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi. Akibatnya sebagian badan jalan yang seharusnya dapat di gunakan dengan baik, menjadikan para pengguna kendaraan dan pejalan kaki jadi terhambat dan mengganggu lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi dan Peraturan Walikota nomor 12 tahun 2015 tentang pengelolaan pasar, Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, harusnya kawasan tersebut bebas dari para pedagang dan segala yang mengganggu fungsi jalan. Namun dalam kenyataannya dikawasan tersebut masih sering dijumpai Kehadiran pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) tersebut sering kali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya.

Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Kota Tebing Tinggi yang bersih, tertib, dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tebing Tinggi.

SATPOL PP mempunyai tugas pokok yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Selain itu SATPOL PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dengan adanya SATPOL PP diharapkan dapat mampu dalam mengendalikan Pedagang Kaki Lima di Kota tebing tinggi dan mensejahterakan masyarakat Kota tebing tinggi.

Membanjirnya PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Tebing Tinggi. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kota Tebing Tinggi telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan

ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikuskertakan ketertiban masyarakat.

Program penataan pedagang kaki lima di kota Tebing Tinggi ada tiga tahapan,yaitu :

1. Sosialisasi,dimaksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang. Diharapkan kesadaran pedagang untuk tidak berjualan di tepi jalan maupun trotoar.
2. Menertibkan,apabila setelah dilakukannya sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi jalan untuk berjualan,maka petugas Satpol PP dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah penggusuran.
3. Merelokasi, pemerintah daerah memberikan para pedagang kaki lima ke tempat yang semestinya yaitu pasar tradisional.

Seperti tahapan penataan di atas, sebelum dilakukan penggusuran, terlebih dulu petugas melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Petugas memberi penjelasan mengenai peraturan yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima, bagaimana dan dimana seharusnya mereka berjualan agar tidak melanggar aturan. Serta tindakan apa yang akan pemerintah daerah setempat lakukan kepada pedagang kaki lima bila menemukan adanya pelanggaran aturan. Sehingga diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengerti dengan jelas dan mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya meskipun

telah dilakukan sosialisasi, mereka tetap pada pendiriannya untuk berjualan di tempat yang bukan semestinya.

Penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar Gambir dilakukan dengan melakukan pengusuran. Pemerintah tidak semata-mata melakukan penertiban, tetapi para pedagang kemudian direlokasi ke pasar tradisional yang ada.

Hal ini banyak mendapatkan protes dari para pedagang kaki lima karena alasan :

1. Tempat relokasi kurang strategis, sehingga kemungkinan keuntungan yang mereka dapatkan berkurang, dan
2. Karena alasan tidak mampu untuk membeli kios atau loos yang mahal.

Sehingga selama ini yang terjadi adalah beberapa hari setelah dilakukannya penertiban itu, tepi jalan dan trotoar menjadi bersih dari tidak adanya pedagang. Namun selanjutnya ketika kondisi sudah terkendali dalam arti tidak adanya petugas Satpol PP yang memantau/ mengawasi, mereka kembali berjualan seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Meskipun telah dilakukannya penataan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, namun pedagang kaki lima tetap pada pendiriannya untuk tetap berdagang di tempat yang tidak semestinya, tentu saja hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Tentu hal tersebut bukanlah hasil yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena dampak yang terjadi berlawanan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Dilihat dari kejadian di atas, bila sosialisasi tentang peraturan tersebut berlangsung dengan baik yang mana para pedagang dapat menerima pesan yang disampaikan dengan jelas, dan sikap dari pedagang kaki lima yang mau bekerjasama melaksanakan peraturan, tentu akan berdampak baik bagi keberhasilan program tersebut. Akan tetapi dalam menciptakan keberhasilan program tersebut terdapat beberapa kendala yaitu masih sangat sulitnya untuk meyakinkan kepada para PKL bahwa yang mereka lakukan sangatlah memiliki resiko berbahaya karena menggunakan badan jalan untuk berdagang meningkatkan resiko kecelakaan bukan hanya kepada para pembeli namun juga bagi para pedagang itu sendiri. Keuntungan yang di dapat dengan berjualan di badan jalan membuat para pedagang tidak memeperdulikan akan bahayanya.

Seharusnya Pemerintah Daerah dan para Satpol PP lebih meningkatkan dan menjelaskan secara lebih mendalam akan dampak negatif berjualan di badan jalan serta diharapkan untuk melakukan pengawasan rutin oleh pihak Satpol PP untuk memantau para pedagang kaki lima.

Maka dari sinilah peneliti hendak mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima. Dengan kewenangan yang telah diberikan tersebut, diharapkan Satpol PP mampu menata dan membina aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud dari penegakan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih**

Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang akan dicari jawabannya dengan mengumpulkan data dalam bentuk berbagai rumusan masalah berdasarkan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi (sugiyonno). Eksplanasi sendiri memiliki pengertian tentang proses terjadinya suatu fenomena.

Berhubung dengan hal yang di uraikan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang memunjukkan adanya hasil, sesuatu yang dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, selain itu juga bertujuan untuk mengungkapkan keinginan penelitian untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban PKL di kawasan pasar gambir kota Tebing Ting

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

A. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, untuk menemukan konsep baru bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

B. Akademis

- Bahan informasi, telahan, kajian dan konsep-konsep ilmiah bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki relevansi dan topik yang sama.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai sumbangan peneliti kepada almamater dan juga dapat digunakan untuk melengkapi bahan kepustakaan.

1.4 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Penjabaran tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEOROTIS

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang efektivitas, pengertian pelaksanaan, pengertian program, pengertian pasar, pengertian pedagang kaki lima dan pengertian kinerja Satpol PP.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, fokus penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektifi yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai.

Kurniawan (2005 :109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaanya. Sedarmayanti (2009 :59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Konsep efektivitas yaitu : Suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh target(kualitas,kuantitas,waktu)yang telah dicapai,makn besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala

kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

2.1.1 Pengertian Efektivitas Program Kerja

Efektivitas merupakan suatu hubungan antara kegiatan dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan (Mahmudi 2005 :92).

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan (Westra 1982 : 52).

Program kerja merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya (Umar 2000: 50). Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas terdapat 2 alasan mengapa program kerja menjadi suatu yang penting dan harus disusun, yaitu : (1) lebih efisien dengan adanya program kerja maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu banyak dan mempersingkat waktu. (2) lebih efektif dengan adanya program kerja maka semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat disinkronkan dengan unit atau definisi kepengurusan yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas program kerja adalah suatu kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai sebuah penerapan. Ajone dan Wildavsky dalam Usman (2002:70) bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Berdasarkan definsi diatas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.
- b. Resouces (sumberdaya), meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

2.3 Pengertian Program

Joan L. Herman oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”

Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

Dengan demikian dapat disimpulkan program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumberdaya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.4 Pengertian Pasar

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang

disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Basu Swastha dalam Kholis, dkk (1995: 20) bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya. Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi menurut Skousen dan Stice (2007: 71) adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2.5 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima sebagai pelaku ekonomi di sektor informal merupakan contoh konkrit yang dapat dilihat pada realitas kehidupan yang ada di kota Tebing Tinggi. Pedagang Kaki Lima atau biasa disingkat dengan PKL adalah istilah

untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. (Wikipedia.org/org/wiki/pedagang_kaki_lima).

Sarjono (2005 : 5) menjelaskan pedagang kaki lima dari sudut sosiologi, bahwa : “pedagang kaki lima merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti etnik, bahasa, agama, adat istiadat, asal daerah, dan jenis kegiatan. Keragaman inilah yang di dalam konteks sosiologi dikenal dengan istilah pluralism.”

Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak (Peraturan Walikota nomor 45 dan 46 tahun 2009 tentang penertiban PKL).

Sementara itu ,Popkin 1979 (Sarjono 2005 :5) menjabarkan bahwa pedagang kaki lima merupakan jaringan kerja sendiri yang melalui mekanisme sosial tradisional seperti keluarga, ikatan kedaerahan atau teknik, serta agama untuk memperoleh peluang kerja. Atau mereka dapat menjalin hubungan yang intern dengan sektor lain sehingga mereka bisa diterima dengan kompensasi-kompensasi tertentu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Demikian pula yang terjadi dengan banyaknya pedagang kaki lima ditempat-tempat strategis

di tengah kota, maka pemerintahan kota tidak dapat ltinggal diam. Apalagi keberadaan mereka sudah tentu akan dapat memberikan positif terhadap pendapatan daerah apabila dikelola dengan baik,terlepas dari dampak negatif yang di timbulkan.

Selain pengertian diatas,istilah PKL biasanya di kaitkan juga dengan peralatan atau cara pedagang tersebut dalam berdagang. PKL biasanya digunakan untuk mengistilahkan pedagang yang menjajakan dagangannya dengan kereta dorong. Kereta dorong tersebut memiliki dua roda,dan jika berhenti harus ditambah 1 tiang penyangga . Apabila dijumlahkan dengan 2 kaki orang atau penjualnya adalah berjumlah kaki atau roda atau tiang penyangganya adalah berjumlah 5,sehingga disebut Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya ,Jhon Cross dalam Sarjono (2005:11) mengatakan bahwa :
“Pedagang Kaki Lima merupakan suatu bentuk usaha sektor informal,dimana sektor ekonomi informal ini merupakan aktivitas ekonomi yang cenderung berlangsung diluar norma-norma sektor ekonomi formal transaksi yang ditetapkan oleh negara dan praktik bisnis formal.”

Sedangkan Agustinawati (2000 : 17) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relative sedikit berusaha dibidang produksi, penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat,yang dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Berdasarkan tinjauan diatas,maka PKL tergolong sektor informal.sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-menengah),yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Wirosandjojo (2007 : 16 -17) :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur,baik dalam arti waktu,permodalan maupun penerimaan
- b. Modal,peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya kecil dan diusahakan berdasarkan hitungan harian
- c. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya
- d. Tidak memilik keterkaitan dengan usaha lain yang besar
- e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah
- f. Tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus,sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan rendah
- g. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama
- h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal.

Kemudian dalam perkembangannya ,sektor ini selalu berkembang. Masing-masing individuberusaha mengembangkan diri kearah yang formal. Perkembangan PKL berhubungan dengan karakter yang dimiliki para PKL

tersebut. Berdasarkan bangunan tempat berdagang para PKL, maka dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. PKL permanen(keseluruhan bangunan tidak pernah dibongkar atau dipindahkan , bangunan PKL selalu ada setiap saat baik pada waktu digunakan ataupun tidak).
- b. PKL non permanen (keseluruhan struktur bangunan dapat dibongkar dan dipasang kembali dalam waktu yang relatif singkat,biasanya sebagian atau keseluruhan struktur bangunan akan dibongkar jika tidak digunakan untuk berdagang).
- c. PKL movable/berpindah-pindah (PKL selalu berpindah tempat,tanpa bangunan yang menetap,menggunakan peralatan gerobak dorong,pikulan,gendongan,dan sebagainya).
- d. PKL tanpa bangunan (PKL yang tidak memiliki bangunan,tidak menggunakan peralatan untuk berpindah tempat ,biasanya menggunakan gelaran,dasaran, panel display dan sebagainya).

Jenis tempat usaha yang digunakan sebagai usaha dibedakan menjadi empat jenis,yaitu :

- a. Kios permanen yaitu tempat usaha PKL yang bersifat tetap atau peruntukkannya dalam jangka waktu relatif lama. Umumnya ditandai dengan adanya atap dan penyangga yang permanen, di beberapa usaha juga dibangun dinding baik dari tembok ataupun kayu/bambu.

- b. Tenda yaitu tempat usaha PKL dengan memakai tenda atau abahan lain yang mudah digulung setelah selesai usaha. Beberapa usaha PKL yang tidak menggulung tenda setelah selesai usaha, dalam hal ini tetap di kategorikan berjenis bertenda
- c. Gerobak dorong adalah jenis usaha PKL dengan memakai tempat usaha yang beroda yang memudahkan untuk berpindah. Termasuk disini usaha PKL dengan memakai mobil bak terbuka.
- d. Oprokan adalah jenis tempat usaha PKL yang hanya memanfaatkan jalan atau tanah dengan sedikit diberi alas untuk menggelar dagangannya.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang sebenarnya dimaksudkan untuk kegiatan usaha.

2.6 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Tebing Tinggi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dari defenisi tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja atau performance merupakan capaian atau hasil dari suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang di nilai dari kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan tugasnya sesuai dengan target atau sasaran yang telah di tentukan sebelumnya atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang di emban oleh organisasi atau instansi tersebut.

Sedangkan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP kota Tebing Tinggi adalah pelayanan akan penertiban PKL di kawasan pasar gambir dan pasar

bunga kota Tebing Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di selenggarakan oleh pemerintahan daerah. Dalam penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi (Satpol PP Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja indikator tersebut yaitu : *effectiveness, responsiveness, dan accountability*. Secara rinci beberapa aspek yang digunakan untuk pengukur kinerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Effectiveness (efektivitas)

Efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, kata efektivitas juga dapat diartikan sebagai tercapainya suatu efek, dampak atau akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan.

Efektivitas akan lebih mudah dipahami jika dilihat dari sudut pandang pencapaian tujuan secara optimal, yaitu efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan gambaran diatas dapat disampaikan bahwa efektivitas adalah suatu keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang benar dan tepat pada waktunya untuk mencapai sasaran, target, tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

pengelolaan kawasan pasar gambir dan pasar bunga. Dalam pelaksanaan efektivitas ini, mengenai penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP kota Tebing Tinggi dalam berbagai program yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektifkah program-program penertiban pedagang kaki lima itu yang sudah dilaksanakan dan melihat dari hasil pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari standar operasional prosedur (SOP), visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Responsiveness (responsivitas)

Responsivitas merupakan salah satu konsep yang digunakan sebagai aspek untuk menilai kinerja. Responsivitas ini merupakan daya tanggap yang dimiliki suatu organisasi terhadap suatu permasalahan. Konsep responsivitas menurut Widodo (2002 : 151) merupakan konsep pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat) yakni seberapa tanggap para administrator negara bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas berarti kemampuan dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga Kota Tebing Tinggi, dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari masyarakat berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari PKL.

Dalam penelitian ini indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar daya tanggap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam menyikapi keluhan atau aspirasi dari masyarakat terkait dengan adanya PKL di kawasan pasar gambir dan pasar bunga . responsivitas sangat diperlukan dalam penelitian ini, hal ini untuk menilai kemampuan untuk merespon akan masalah, keluhan apasaja yang dihadapi oleh masyarakat dan para pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga kota Tebing Tinggi, dilain pihak dengan adanya kemampuan ini, maka selanjutnya adalah langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Responsibility (responsibilitas)

Responsibilitas menurut Ratminto dan Winarsih (2010 : 181) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Responsibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses penelitian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bungan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk responsibilitas dalam penelitian ini diperlukan guna mengetahui upaya-upaya penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tebing Tinggi merupakan suatu keputusan yang benar dan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Kota Tebing Tinggi . disisi lain responsibilitas digunakan untuk menghindari akan adanya masalah yang timbul

baik secara horizontal maupun vertikal dari pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga.

Dalam penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga. Responsibilitas bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penertiban PKL itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

2. Accountabillity (akuntabilitas)

Dwiyanto (2006 :50).akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merespresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Kinerja organisasi publik tdak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian sasaran organisasi. Dalam penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi terhadap masyarakat sebagai penggunaan fasilitas umum akan keberadaan dari PKL yang ada di kawasan tersebut. Dengan indikator akuntabilitas ini bisa diukur seberapa besar pertanggungjawaban pihak Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga.

Beberapa indikator inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebing Tinggi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar gambir dan pasar bunga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

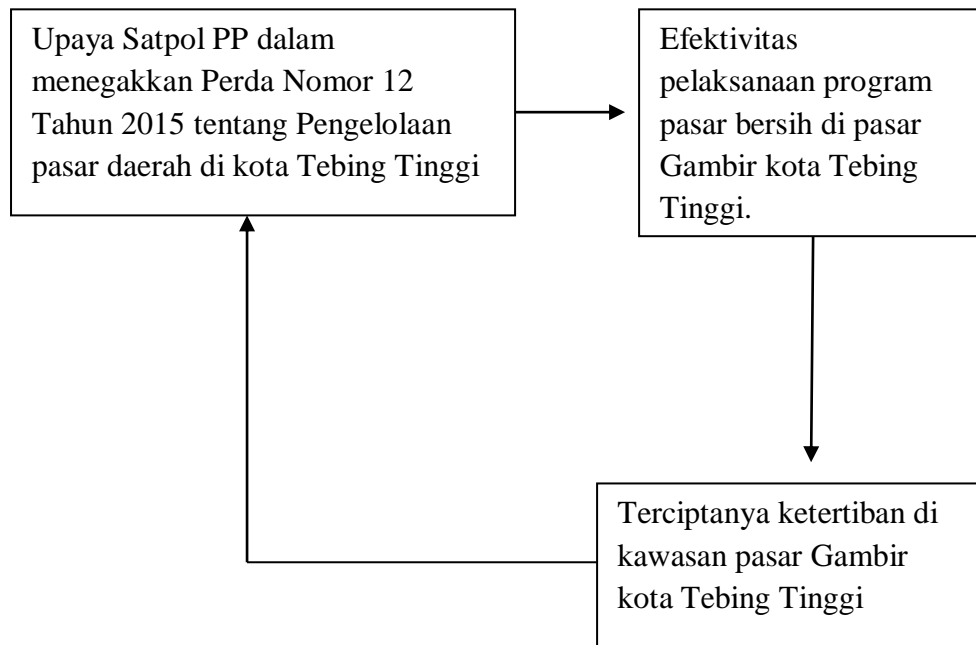
Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis Kualitatif. Mendefinisikan penelitian kualitatif menurut (Koentjaraningrat, 1993:89) adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi .

Kerangka konsep yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Berawal dari suatu upaya SATPOL PP dalam menegakkan Perda Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan di kota Tebing Tinggi. Upaya tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam melaksanakan Perwa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan pasar daerah di Kota Tebing Tinggi. Kegiatan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan mengetahui apakah pelaksanaan program penertiban PKL berjalan dengan baik.

Maka kerangka konsep yang digunakan dan disusun dalam bagan berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi Konsep

Arti konsep menurut Soedjadi (2000:14) adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa).

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti :

- a. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Efektivitas program adalah keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantung yang menuju ke arah pencapaian tujuan, segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana.
- c. Efektivitas program kerja yaitu suatu kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam pencapaian tujuannya.
- d. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi adalah suatu proses kognitif untuk mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa ke dalam kategori-kategori tertentu yang bermakna (Turner dan Giles, 1985; Branscombe dkk, 1993).

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- 3.4.1** Adanya tujuan pelaksanaan program kerja
- 3.4.2** Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam melaksanakan kegiatan
- 3.4.3** Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan.
- 3.4.4** Adanya kinerja

3.5 Narasumber

Adapun narasumber adalah sebagai berikut :

- 3.5.1** Kabid Penegak Perda dan Perwa Satpol PP kota Tebing Tinggi

- a. Nama : Mhd. Dahler,SH
- b. Umur : 47 Tahun
- c. Jabatan : Kabid Penegak Perda dan Perwa
- d. Alamat : Jl. Yos Sudarso Gunung Martimbang Tebing Tinggi No 1

3.5.2 staff satuan Satpol PP kota Tebing Tinggi

- a. Nama : Irfan Ardiansyah
- b. Umur : 34 Tahun
- c. Jabatan : Satuan Pengamanan
- d. Alamat : Jl. Setia Lk.5 Kel.Lestari Kec.Kisaran Kb.Asahan

3.5.3 Pengutip Retribusi Pasar :

- a. Nama : Abdi laia
- b. Umur : 40 Tahun
- c. Jabatan : Pengutip Retribusi Pasar
- d. Alamat : Gg.Rukun Lk.1 Tebing Tinggi.

3.5.4 2 orang pedagang kaki lima

- a. Nama : Rizal
- b. Umur : 40 Tahun
- c. Alamat : Persiakan ,Tebing Tinggi0
- d. Nama : Linda
- e. Umur : 38 Tahun
- f. Alamat : Jl.Bulian Tebing Tinggi

3.5.5 2 orang masyarakat kota Tebing Tinggi :

- 1 Orang wanita

- a. Nama : Dinda Mutiara Syahputri
 - b. Umur : 22 Tahun
 - c. Jabatan : Mahasiswa
 - d. Alamat : Jl.Prof.dr.Hamka,Tebing Tinggi
- 1 orang pria
- a. Nama : Chaidir
 - b. Umur : 55 Tahun
 - c. Jabatan : Wiraswasta
 - d. Alamat : Jl.Sei Padang Tebing Tinggi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh, dan dikumpulkan suatu informasi. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang berasal dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai penertiban PKL .

Sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisnil. Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

1) Pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.

2) Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pedoman wawancara diklasifikasikan menjadi dua yaitu meliputi pedoman wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

3.7 Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan ide seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pelaksanaan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima dan respon dari PKL di kota Tebing Tinggi yang berada di kawasan pasar gambir sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang yang terdiri dari empat kegiatan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, penggolongan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di pasar gambir dan kantor Satpol PP kota Tebing Tinggi lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Dan waktu penelitian dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi dan waktu penelitian dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

- a. Dasar Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi adalah :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Tebing Tinggi.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Tebing Tinggi.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Tata kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja kota Tebing Tinggi.

b. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi Satpol PP Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekertaris Terdiri dari
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum terdiri dari :
 - Kasi Oprasional dan Pengendalian
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kasi Pengamanan dan Pengawalan
4. Bidang Penegakan Perda dan Perwa
 - Kasi Kerjasama
 - Kasi Penyuluhan dan Pembinaan

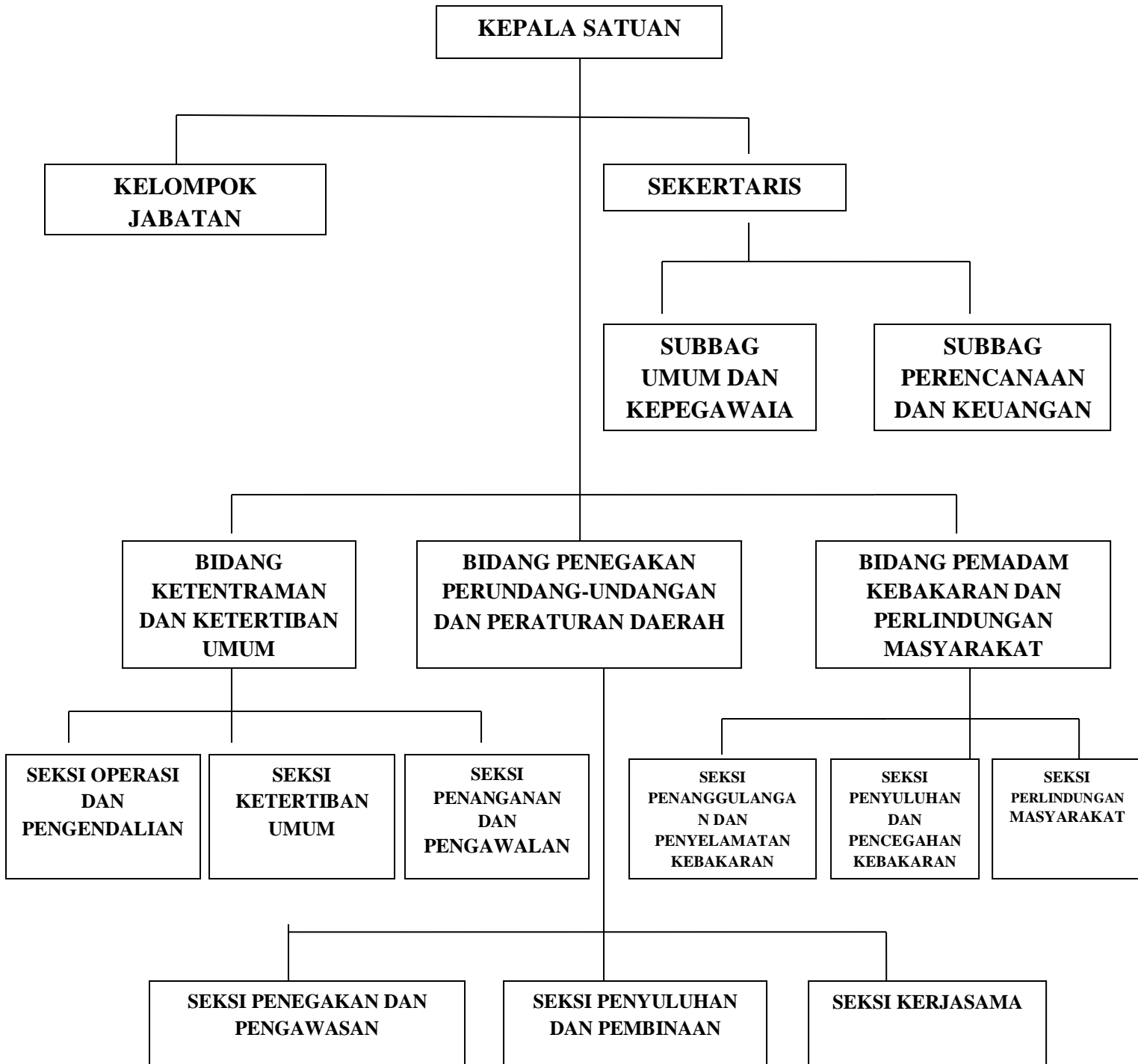
- Kasi Penegakan dan Pengawasan

5. Kabid Damkar dan Linmas

- Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
- Kasi Perlindungan Masyarakat
- Kasi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi



Sumber : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yakni Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

a) Uraian Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Uraian Tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Prajaj sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi operasional dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang operasional dan pengendalian. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasional dan pengendalian;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum;
2. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan ketertiban umum; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang pengamanan dan pengawasan. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawasan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di

bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Adapun fungsinya:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penegakan dan Pengawasan

Seksi Penegakan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penegakan dan pengawasan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan dan pengawasan;
2. Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang penyuluhan dan pembinaan. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pembinaan;
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pembinaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang kerjasama. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama;
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

l) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. Adapun fungsinya:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan teknis bidang perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lapangan atau di kenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang di peroleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Dinas perdagangan UPTD PASAR yang berada di Jalan MT.Haryono kota Tebing Tinggi, kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi jalan Tuanku Imam Bonjol kota Tebing Tinggi,serta pasar Gambir yang berada di jalan Iskandar Muda Kota Tebing Tinggi, terkait tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi.

Untuk mendukung perolehan data,selain data primer,data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui prosuder yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pegawai/staf Dinas UPTD PASAR dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklasifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.

Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

4.1.1 Penyajian Data

a. Identitas Narasumber

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut di jelaskan persentase untuk masing-masing kategorisasi.

Tabel 4.1

Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-Laki	5 Orang
2.	Perempuan	2 Orang

Sumber data Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 2 oarang.

b. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu SMA dan tingkat setara sarjana. Pada tabel 4.2 akan disajikan untuk masing-masing dari kategorisasi tersebut :

Tabel 4.2
Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Nama	Umur
1.	Mhd. Dahler. SH	47 Tahun
2.	Irfan Ardiansyah	34 Tahun
3.	Abdi Laia	40 Tahun
4.	Rizal	40 Tahun
5.	Linda	38 Tahun
6.	Dinda	22 Tahun
7.	Chaidir	55 Tahun

Sumber pada tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber yang memiliki tingkat pendidikan sampai SMA sebanyak 6 orang, sementara tingkat Sarjana sebanyak 1 orang.

c. Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan ,narasumber dikelompokkan menjadi 6 kategorisasi yaitu : Kabid Penegak Perda dan Perwa Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Pengamanan Satuan Polisi pamong praja, pengutip Retribusi Pasar , Wiraswasta, Pedagang kaki lima dan Mahasiswa. Pada tabel 4.4 akan dipaparkan frekuensi untuk masing-masing kategorisasi menurut pekerjaan/jabatan.

Tabel 4.3**Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan**

No.	Jabatan/Pekerjaan	Frekuensi
1.	Kabid penegak Perda dan Perwa	1
2.	Satuan Pengamanan	1
3.	Pengutip Retribusi Pasar	1
4.	Wiraswasta	1
5.	Pedagang Kaki Lima	2
6.	Mahasiswa	1
Jumlah		7

Sumber data tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan/jabatan sebagai Kabid penegak Perda dan Perwa sebanyak 1 orang, Satuan Pengamanan sebanyak 1 orang, Pengutip Retribusi Pasar sebanyak 1 orang, Pedagang sebanyak 2 orang, Wiraswasta sebanyak 1 orang dan mahasiswa sebanyak 1 orang.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi jalan Tuanku Imam Bonjol kota Tebing Tinggi.

Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui prosuder yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima di pasar Gambir kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber/responden di lapangan, maka data dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga dapat di peroleh rekapulasi data sebagai berikut :

4.2.1 Adanya Tujuan Pelaksanaan Program Kerja Pasar Bersih.

Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan program pasar bersih yang telah di sepakati terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MH.Dahler.SH selaku Kabid Penegak Perda dan Perwa Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi, tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“ Yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima adalah karena kami melihat bahwa fungsi jalan dan trotoar sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga mengganggu para pejalan kaki dan kendaraan bermotor di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bukan hanya kepada pejalan kaki yang melintasi jalanan tersebut tetapi juga kepada para pedagang disitu”*.

Kemudian peneliti menanyakan lagi yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan :*“Kendalanya adalah para pedagang mengatakan bahwasannya dagangannya tidak laku jika ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, padahal menurut peninjauan kami tidak demikian kalau memang mereka mau berjualan di tempat yang sudah di sediakan dan di bedakan antara pedagang sayur,daging,ikan dan lain lainnya mungkin para pembeli akan mengarah kesana tapi karena mereka tidak mengikuti aturannya,mereka turun kebahu-bahu jalan,yang akhkirnya membuat jalanan kotor,banyak penyakit karena menyebabkan jalanan becek dan tidak teratur”*.

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah kinerja satpol PP dapat mencapai rencana yang diharapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Kami selaku keluarga Satpol PP sangat amat berharap kinerja kami dapat mencapai rencana yang diharapkan. namun pada kenyataannya kami belum semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban kepada para pedagang di pasar tersebut,dikarenakan yang membuat program ini adalah Dinas Perdagangan,dan juga Dinas Kebersihan juga ikut tergabung.Jadi hendaknya 3 Instansi ini bekerja sama langsung turun ke lapangan,jangan bergerak sendiri-sendiri saja”*.

Pertanyaan selanjutnya apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Ya masyarakat kota Tebing Tinggi sangat amat mampu*

untuk mendukung program ini,dengan cara mereka jangan mau membeli dagangan yang ada di trotoar atau bahu jalan,tapi belilah di tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan kota Tebing Tinggi,secara otomatis pasti para pedagang juga ikut naik ke tempat yang sudah di sediakan karena melihat bahwa pembeli lebih suka untuk berbelanja di tempat yang sudah disediakan”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara juga dengan Bapak Irfan Ardiansyah selaku Satuan Pengamanan Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi, tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“Fungsi jalan sudah tidak sesuai dengan semestinya,banyak sekali org yang berlalu-lalang di tengah jalan untuk berbelanja,sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan dan kendaraan”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Para pedagang sangat susah untuk di tempatkan di tempat yang sudah disediakan dengan alasan dagangannya tidak laku,sehingga program ini tidak berjalan dengan semestinya”.*

Peneliti melanjutkan pertanyaan tentang apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana yang diharapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih di Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan: *“Ya kami berharap bisa untuk mencapai program itu,namun pada nyatanya pedagang sangatlah susah untuk di beri arahan dan pengertian sehingga mereka kembali lagi ketempat semula”.*

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung pelaksanaan program pasar bersih Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *”Ya masyarakat dapat mendukung dengan cara tidak membeli dagangan di trotoar.karena itu melanggar aturan yang ada dan juga membahayakan keselamatan mereka sendiri.”*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Tebing Tinggi Bapak Chaidir tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“Menurut saya faktornya adalah karena banyak pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar yang seharusnya bukan untuk berdagang tetapi kendaraan dan pejalan kaki”*.

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang hambatan dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Kendalanya mungkin adalah para pedagang itu tidak mau naik keatas karena tidak laku da mungkin tempatnya sedikit sempit untuk menampung semua pedagang yang ada”*.

Kemudian peneliti bertanya kembali apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana yang di harapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi : Beliau menyatakan : *“Mungkin kalau di tindak sangat tegas bisa untuk mencapai harapan itu dengan sanksi yang ada dan harus di jalankan,tapi kenyataanya memang cukup sulit”*

Peneliti menanyakan kembali apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung Pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Ya saya selaku masyarakat amat sangat mendukung karena saya sangatlah tidak suka jika di jalan tersebut yaitu pasar Gambir terjadi kemacetan yang cukup lama hanya karena terjadi aktivitas jual beli disana dan itu juga cukup membahayakan bagi kita yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki”*.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Tebing Tinggi ibu Dinda Mutiara Syahputri tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“Faktor pelaksanaan program ini saya rasa karena pedagang kaki lima yang memenuhi jalan yang seharusnya bukan itu fungsinya melainkan jalan itu untuk pejalan kaki”*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Kendalanya adalah para pedagang tidak mau naik ke tempat yang sudah disediakan pemerintah dan juga sebagian masyarakat tidak mau membeli di tempat yang sudah disediakan oleh karena itu pedagang membuat alasan tidak mau naik karena dagangan tidak laku”*.

Peneliti menanyakan kembali apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana yang diharapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing

Tinggi. Beliau menyatakan : *“Ya bisa,tapi saya rasa itu cukup sulit melihat ada beberapa pedagang yang membandel dan para pembeli yang tidak mau membeli diatas”*.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung pelaksanaan program ini. Beliau menyatakan : *“Bisa karena yang diharapkan pedagang itu adalah dagangannya laku oleh konsumen dan keuntungan yang memungkinkan untuk kehidupannya sehari-hari,jadi jikalau masyarakat kota tidak membeli di jalan tetapi membeli di tempat yang sudah disediakan pastilah pedagang juga ikut naik keatas karna melihat keuntungan yang ada”*.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Kota Tebing Tinggi Ibu Linda tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“Menurut saya karena kami para pedagang berjualan di tempat yang tidak seharusnya yang membuat kemacetan”*.

Kemudian peneliti kembali bertanya kendala dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Kendalanya mungkin karena kami para pedagang sebagian tidak mau pindah ketempat yang sudah disediakan”*

Peneliti menanyakan kembali apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana yang diharapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing

Tinggi. Beliau menyatakan : *“Mungkin tidak bisa kalau sesuai dengan rencana,karena jika kami para pedagang pindah keatas pasti keuntungan kami kecil atau tidak laku sama sekali”*.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung program pasar bersih ini. Beliau menyatakan : *“ya bisa,karena kami para pedagang kan mengikuti dimana ramainya pembeli agar dagangan kami laris,dan kebetulan karena para konsumen kami lebih banyak yang membeli di jalanan seperti ini di trotoar,maka dari itu kami berjualan disini”*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Kota Tebing Tinggi Bapak Rizal tentang pertanyaan yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : *“karena melihat banyak pedagang yang turun kejalanan dan membuat kemacetan”*.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kendala dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“kendalanya mungkin pedagang seperti kami tidak mau naik ketempat yang sudah disediakan pemerintah”*.

Peneliti menanyakan kembali apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana sesuai dengan harapan dalam pelaksanaan program pasar bersih. Beliau menyatakan : *“menurut saya bisa kalau masyarakat atau pembeli-pembeli ini*

juga lebih banyak yang membeli diatas di tempat yang sudah disediakan pemerintah bukan di jalan trotoar seperti ini”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Bisa,karena kan kami mengikuti arus masyarakat, dimana mereka suka membeli ya kami juga ikut kesana.*

Berdasarkan jawaban dari 6 narasumber peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan pelaksanaan program kerja pasar bersih adalah karena adanya kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengganggu pengguna jalan dan para pengendara bermotor.

4.2.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan(Prosedur) dalam Pelaksanaan Program Kegiatan.

Untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima pada dasarnya memerlukan tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan program kegiatan agar pelaksanaan yang sedang di jalankan dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MH.Dahler.SH selaku Kabid Penegak Perda dan Perwa Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi, tentang proses pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban PKL kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“Proses pelaksanaan yang dilakukan pada*

awalnya melakukan pertemuan dengan para pedagang kaki lima yang berlokasi di kantor Satpol PP, kemudian kami mensosialisasikan kepada mereka (pedagang kaki lima), setelah kami sosialisasikan seharusnya mereka mengikuti peraturan yang telah ditentukan”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apa saja kendala dalam proses pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“kendalanya itu kadang saat penertiban dilaksanakan tertadi perdebatan yang cukup sengit oleh pihak Satpol dan pedagang”.*

Peneliti menanyakan kembali apakah ada rancangan sebelum membuat tata cara pelaksanaan (prosedur) program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *”sebenarnya yang membuat program ini adalah Dinas Perdagangan kota Tebing Tinggi, jadi yang membuat rancangan adalah mereka, jadi rancangan itu ada tapi yang membuat adalah mereka. sebelum membuat tata cara itu pastilah ada rancangan setelah memikirkan sebab dan akibatnya, sebagaimana diharapkan agar tata cara itu dapat membuat para pedagang mengerti dengan cara yang baik dan sopan serta mudah dipahami”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah proses pelaksanaan program pasar bersih yang dilaksanakan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *”dampaknya kepada masyarakat kota Tebing Tinggi jika program ini berjalan lancar dan berhasil maka jalanan di pasar Gambir itu akan terbebas dari kemacetan, dan lingkungan yang kotor, sehingga pastinya masyarakat akan lebih nyaman untuk*

melewati kawasan pasar Gambir tersebut. Namun pada kenyataannya kami kurang berhasil untuk menanggulangi pedagang yang cukup membandel untuk pindah ke tempat yang sudah di sediakan sehingga dampaknya masih begitu-begitu saja dan pasti kurang nyaman untuk melewati kawasan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dinda Mutiara Syaputri selaku masyarakat kota Tebing Tinggi, tentang proses pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban PKL kota tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“yang saya tau pasti ada sosialisasi kepada para pedagang yang nantinya sosialisasi tersebut membuat mereka mengerti dan paham kenapa program ini dibuat”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan pasar bersih kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“menurut saya kendalanya mungkin ada beberapa pedagang yang tidak datang ke kantor Satpol PP untuk sosialisasi itu”.*

Peneliti menanyakan kembali tentang adanya rancangan sebelum membuat tata cara pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“kalau itu saya kurang mengetahui ada atau tidaknya rancangan sebelum adanya prosedur itu”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah proses pelaksanaan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“kalau program ini berhasil saya selaku masyarakat kota*

Tebing Tinggi pasti cukup senang jika pedagang ini pindah ke atas dari pada di jalanan, karena jalanan akan lempang, tidak ada kemacetan dan tidak kotor”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Linda dan Bapak Rizal selaku pedagang kaki lima, mereka memiliki pendapat yang sama tentang pertanyaan yang akan di ajukan. Yang pertama yaitu mengenai proses pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban PKL. Beliau menyatakan : *“dalam proses itu kami di ajak untuk melakukan pertemuan di kantor Satpol PP, kemudian kami disosialisaikan tentang perpindahan tempat yang awalnya dari jalan kemudian naik ke tempat yang sudah disediakan.”*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja kendala dalam pelaksanaan program pasar bersih itu. Beliau menyatakan : *”kadang terjadi perdebatan antara kami dan pihak Satpol PP tapi tidak sampai ada hal yang berlebihan seperti pemukulan atau apapun itu, hanya cekcok saja antara petugas dengan pedagang yang bersangkutan”.*

Peneliti menanyakan kembali tentang pertanyaan apakah ada rancangan sebelum membuat tata cara pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“ kalau itu saya kurang mengetahui karena kami hanya tau proses tata caranya itu. kami hanya terlibat pada saat sosialisasi saja kalau rancangannya tidak tahu”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah program ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kota Tebing Tinggi. Beliau

menyatakan : *“menurut saya tidak,karena kalau masalah kami mmebuat macet para msayarakat kota bisa melewati jalan yang lain yag jaraknya sama saja dengan kawasan pasar Gambir ini”*.

Berdasarkan jawaban dari 4 narasumber peneliti mengambil kesimpulan bahwa tata cara pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan cara yang baik yakni dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu, sosialisasi dan jika para pedagang tetap berjualan di tempat yang tidak seharusnya setelah adanya sosialisasi tersebut maka akan di berikan sanksi berupa penahanan barang dagangan sementara.

4.2.3 Adanya Rencana Sesuai dengan Pelaksanaan

Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan sangat diharapkan demi keberhasilan program yang sudah dilaksanakan. rencana-rencana itu diharapkan untuk dapat diterapkan pada pelaksanaan sehingga mampu menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan program dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MH.Dahler.SH selaku Kabid Penegak Perda dan Perwa Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi, tentang pelaksanaan program pasar berih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan pemerintahan kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *”saya kira belum sesuai dengan yang diharapkan, karena bisa kita lihat sendiri sebagaimana untuk membuat para pedagang naik dan tidak kembali ketempat semula cukup sulit karena anggapan mereka yang*

menyatakan dagangannya tidak laku, maka dari itu 3 instansi yakni Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Dinas Kebersihan serta para Masyarakat kota Tebing Tinggi dapat bekerja sama untuk mendukung program ini”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kendala yang dialami dalam penertiban PKL di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan :
“kendala yang dialami dalam menertibkan PKL itu antara lain, mereka kadang tidak mau untuk di pindahkan ke atas sehingga terjadi cekcok, walaupun mereka mau pindah ke atas itu hanya sementara saja jika ada petugas, namun jika tidak ada petugas yang mengawasi maka mereka akan turun kembali, kita sudah mencoba untuk mengangkat barangnya agar mereka memiliki kesadaran untuk tidak berjualan ditempat itu”.

Peneliti menanyakan kembali hal apa saja yang dilakukan Pemerintah kota Tebing Tinggi dalam rencana yang sudah di tentukan guna pelaksanaan program pasar bersih. Beliau menyatakan :*”pemerintah kota sudah menggerakkan Satpol PP dan untuk menertibkan pedagang kaki lima di pasar Gambir kota Tebing Tinggi, serta Dinas Perdagangan dan Dinas Kebersihan juga ikut dalam program ini”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja harapan dari rencana pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“yang kita harapkan dari dibuatnya program ini adalah agar jalan dan trotoar kembali sesuai dengan*

fungsinya, karena trotoar dan jalan itu digunakan untuk para pejalan kaki dan kendaraan bermotor”.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdi laia selaku pengutip retribusi pasar, tentang pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan pemerintahan kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan :” *kalau dibilang sudah sesuai rencana awal sih belum ya. Karena kita bisa lihat sendiri keadaan pasar itu sekarang bagaimana, ya tetap begitu begitu saja”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali kendala yang dialami dalam penertiban PKL di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : “*yang dapat saya lihat kendalanya itu selain karena mereka tidak mau ke tempat yang disediakan, mereka itu memberontak jika barang dagangannya di angkut untuk diamankan oleh Satpol PP”.*

Peneliti menanyakan kembali hal apa saja yang dilakukan Pemerintah kota Tebing Tinggi dalam rencana yang sudah di tentukan guna pelaksanaan program pasar bersih. Beliau mengatakan : “*pemerintah sudah menggerakkan Satpol PP, memberikan peringatan, sampai memberikan sanksi kepada pedagang untuk tidak berjualan di trotoar”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja harapan dari rencana pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar

Gambir kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“kalau harapan ya pasti kita mau membuat kawasan itu kembali ke fungsinya semula dan mengembalikan hak pejalan kaki dan kendaraan bermotor, membuat jalan bersih dan tertata rapi”*

Berdasarkan jawaban dari 2 narasumber peneliti mengambil kesimpulan bahwa rencana sesuai dengan pelaksanaan, pada kenyataannya belum sesuai dengan rencana awal yang sudah di harapkan di karenakan beberapa faktor yang sudah dipaparkan di atas.

4.2.4 Adanya Kinerja

Adanya kinerja dalam pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban pedagang kaki lima sangat menentukan berhasil tidaknya program pasar bersih ini berjalan, sehingga kinerja para Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Gambir kota Tebing Tinggi sangat diharapkan dapat mengatur para pedagang dengan cara yang baik dan benar tanpa menimbulkan kerugian yang berdampak untuk pedagang maupun Satuan Polisi Pamong praja Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MH.Dahler.SH selaku Kabid Penegak Perda dan Perwa Satuan Polisi pamong praja kota Tebing Tinggi,tentang kinerja pemerintahan kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih. Beliau menyatakan : *“kinerja pemerintahan kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program ini saya kira cukup baik,yakni untuk membuat kawasan pasar Gambir itu bersih dan bebas dari kemacetan. Pemerintahan sudah menggerakkan Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang berjualan di bahu*

atau trotoar jalan. selain itu Dinas Perdagangan dan Dinas Kebersihan juga ikut tergabung dalam program ini. Namun hanya saja 3 instansi ini bergerak tidak secara bersama-sama.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“selain menggerakkan Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima di pasar Gambir ini, kita juga memberikan sanksi terhadap para pedagang yang masih juga membandel, yakni berupa penahanan sementara barang dagangannya. Namun dalam beberapa waktu kedepan pemerintah kita memiliki satu program yang akan membuat “TITPIRIN” yaitu tindak pidana ringan, maksudnya bagi mereka yang tetap bertahan untuk berjualan di trotoar atau bahu jalan kota akan panggil untuk kita sidangkan, apakah nanti mereka dikenakan kurungan atau denda agar mereka sadar jangan berjualan di bahu jalan karena itu milik orang lain bukan tempat untuk berjualan”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang respon PKL dan masyarakat kota Tebing Tinggi melihat kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : *“kalau respon dari PKL sendiri ada yang menerima dan ada juga yang menentang karena tidak mau di pindahkan ke tempat yang sudah di sediakan dengan alasan dagangannya tidak laku. Selain itu bagi yang membandel dan*

tetap berjualan di bahu jalan atau trotoar kami akan menahan sementara barang dagangannya, sebab itulah ada yang menerima dan ada yang tidak. Namun bagi masyarakat kota Tebing Tinggi sendiri mungkin ya pasti senang karna selama beberapa tahun ini kawasan pasar Gambir tersebut kan macet mulai subuh hingga menjelang magrib jadi dengan adanya program ini pastilah mereka senang karna dapat menggunakan kawasan tersebut sesuai dengan fungsinya kembali.

Peneliti menanyakan kembali apakah kinerja Satpol PP sudah maksimal dalam melaksanakan tugas pemerintah kota dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan :*"kalau dibilang maksimal sepenuhnya belum,karena kita harus didukung oleh 3 instansi ini,terutama harus di dukung oleh Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan dan Dinas penanganan jadi 3 instansi ini harus duduk bersama untuk menyelesaikan pasar ini bagaimana agar caranya agar bersih dan sesuai dengan fungsinya, jadi masih ada lagi antara Satpol PP dengan dinas yang lain masih berjalan sendiri,misalnya dinas ini langsung masuk ke pasar tanpa pemberitahuan kepada Satpol PP maupun dinas yang lain belum ada sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau sudah sinkron akan bisa di atasi masalah pasar Gambir ini kembali dengan fungsi yang sebenarnya. Kalau dilihat kinerja Satpol PP ini dalam mengatasi PKL di pasar Gambir itu masih sekitar 75%".*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdi laia selaku pengutip retribusi

pasar, tentang kinerja pemerintahan kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih. Beliau mengatakan : *“Pemerintahan sudah menggerakkan Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang berjualan sembarangan. selain itu Dinas Perdagangan dan Dinas Kebersihan juga ikut tergabung dalam program ini. Namun pada dasarnya pedagang ini bandel yam aka dari tu sulit untuk membuat program ini berhasil.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“Anggota Satpol pp memberikan sanksi terhadap para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan padahal sudah diberikan peringatan,yaitu berupa penahanan sementara barang dagangannya”.*

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang respon PKL dan masyarakat kota Tebing Tinggi melihat kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“kalau respon PKL nya sih ada yang setuju ada yang berontak. Karena mereka mengatakan kalau berjualan di tempat yang sudah disediakan barang dagangannya tidak laku dan mereka jadi rugi.begitu pula masyarakat ada yang setuju ada yang tidak. Karena mereka ada yang suka kalau kawasan pasar Gambir itu kembali ke fungsinya dan ada juga yang suka kalau begini saja membeli dagangan di pinggir jalan”.*

Peneliti menanyakan kembali apakah kinerja Satpol PP sudah maksimal dalam melaksanakan tugas pemerintah kota dalam pelaksanaan program pasar bersih di kota Tebing Tinggi. Beliau mengatakan : *“kalau dibilang maksimal ya belum mungkin masih sekitar 70%,tapi mereka sudahn melakukannya dengan sebaik mungkin”*.

Berdasarkan jawaban dari 2 narasumber peneliti mengambil kesimpulan bahwa mengenai adanya kinerja yang dilakukan Satpol PP serta Dinas lain yang ikut dalam program pasar bersih di kawasan pasar Gambir sudah baik, hanya saja kurang adanya sinkronisasi antara instansi yang satu dengan instansi lainnya.

4.3 Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi

Penelitian ini melihat Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Tebing Tinggi di pasar Gambir sebagai berikut

4.3.1 Adanya tujuan pelaksanaan program pasar bersih.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan (Westa 1985 : 17).

pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan , maka dapat dianalisa bahwa tujuan pelaksanaan program pasar bersih yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP yaitu untuk membuat kawasan pasar Gambir itu kembali sesuai dengan fungsinya dan tidak membahayakan para pengguna jalan dan kendaraan bermotor. Bukan hanya Satpol PP maupun Dinas yang menjalankan program ini tetapi bahkan masyarakat juga mendukung adanya program ini untuk membuat kawasan pasar Gambir lebih tertata dan rapi. Walaupun memiliki beberapa kendala dan hambatan namun pihak Satpol PP selalu berusaha untuk menjalankan program dengan sebaik-baiknya.

4.3.2 Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan program pasar bersih

Implementasi atau pelaksanaan diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan (Usman, 2002 : 70).

Satpol PP sebagai penegak PERDA yang mempunyai tugas untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban serta mengawasi Ketaatan Masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota dalam penertiban

pedagang kaki lima di pasar Gambir dan mengembalikan fungsi jalan di kawasan pasar Gambir kembali kepada fungsi yang sebenar-benarnya. Setiap instansi dalam melaksanakan teknis kegiatannya dengan cara sosialisasi, dimaksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan , maka dapat dianalisa bahwa mengenai Tata Cara Pelaksanaan(Prosedur) dalam Pelaksanaan Program Kegiatan sangat baik. Selain itu dilakukan penyampaian dengan cara yang amat sangat sopan dan mudah dimengerti oleh para pedagang kaki lima agar mengerti sebab-akibat dari kegiatan yang mereka lakukan,hanya terjadi insiden kecil dalam pelaksanaannya yaitu cekcok antara petugas satpol dengan pedagang. Program ini dapat berjalan baik jika saja memberikan sanksi tegas jika saja mereka (para pedagang kaki) membandel dan tetap berjualan yang bukan seharusnya tempat untuk berjualan .

4.3.3 Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan

Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan Syauckani dkk (2004 : 295).

Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan , maka dapat dianalisa bahwa mengenai rencana yang sesuai dengan pelaksanaan , sudah dilakukan sebaik mungkin oleh satuan polisi pamong praja unuk menertibkan para pedagang kaki lima di pasar Gambir, hanya saja kurang tegas dikarenakan sanksi bagi pedagang yang membandel dalam artian tidak mau menempati tempat yang sudah disediakan hanya berupa penahanan barang dagangan sementara oleh pihak satpol PP sehingga harapan yang ingin diwujudkan masih di sebatas harapan dan belum terwujud untuk saat ini.

4.3.4 Adanya kinerja

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo 2010 : 7).

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bebarapa faktor juga dapat mempengaruhi Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. kinerja individual juga dapat diukur, dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada tanggungjawab utama. Bidang kegiatan utama atau tugas kunci yang merupakan bagian adari pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi mereka terhadap pencapaian target per orang, tim, departemen dan instansi serta penegakan nilai dasar Instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa kinerja sudah baik namun belum maksimal, dikarenakan Satpol PP dan

beberapa instansi yang bersangkutan yang tergabung dalam program pasar bersih ini bergerak tidak secara bersama-sama tetapi bergerak sendiri-sendiri yang akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidak sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulisan melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang di nahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kit semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan pelaksanaan program kerja pasar bersih yang dilakukan oleh Satpol PP sudah berjalan cukup efektif dan efisien, namun memiliki hambatan yang dialami Satpol PP seperti PKL dan masyarakat yang membandel, kurangnya sinkronisasi antara instansi satu dengan yang lainnya dan dalam upayanya menghadapi hambatan-hambatan tersebut Satpol PP berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangan yang ada namun Kondisi yang dilihat dilapangan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh pihak Satpol PP Kota Tebing Tinggi.
2. Tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan program kegiatan sudah baik karena dilakukan dengan cara-cara yang sangat mudah untuk di pahami oleh masyarakat awam. Tata caranya diawali dengan pertemuan antara pedagang dan petugas Satpol PP di kantor Satpol PP kota Tebing

Tinggi dan akan di berikan sanksi jika para pedagang masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

3. Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan pada kenyataan belum sesuai dengan apa yang di harapkan pada rencana awal yang sudah di buat untuk program ini karena keberadaan PKL yang semakin menjamur dan kurangnya kesadaran untuk menata barang dagangan para pedagang kaki lima yang tidak hanya dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga kenyamanan.
4. Adanya kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP dan instansi lain yang tergabung dalam program pasar bersih di kaawasan pasar Gambir ini sudah cukup baik karena sudah menjalankan tata cara yang dengan baik dan benar.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan organisasi Satpol PP Kota Tebing Tinggi, maka sosialisasi tujuan dari organisasi Satpol PP kepada seluruh pedagang dan masyarakat yang ada di kota Tebing Tinggi harus terus dilakukan baik melalui rapat, diskusi-diskusi maupun dalam peretemuan informal.
2. Peningkatan efisiensi perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan agar diperoleh formula yang tepat dalam menentukan program kegiatan dengan

sasaran/tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai/mewujudkan misi organisasi.

3. Memberikan sanksi atau denda yang tegas, bukan hanya bersifat sementara tetapi juga permanen agar memberikan efek jera dan tata ruang kota dapat kembali ke fungsi yang sebenar-benarnya.
4. Kinerja yang dilakukan belum maksimal sehingga di perlukannya kekompakan antara instansi satu dengan instansi lainnya agar program pasar bersih ini dapat di wujudakan dan dapat mencapai apa yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Agustinawati, 2000. *Apa dan Mengapa Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Setia.Semarang.
- Alwi,Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pusataka, Jakarta,2005.
- Amin Widjaja*, Tunggal.2004. *Manajemen Strategik*. Edisi Pertama. Harvarindo, Jakarta.
- Basu swastha dan Ibnu Sukotjo, 1995, *Pengantar bisnis modern*, edisi 3, Penerbit Liberty.
- Bambang,Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*,Departemen Dalam Negeri,Jakarta,2005.
- Dirgantoro, Crown*.2001. *Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Grasindo, Jakarta.
- Farida Yusuf. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasibuan ,Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara : Jakarta.
- Koenjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Nurdin Usman,2002,*Konteks implementasi berbasis kurikulum,Bandung*, CV Sinar Baru.
- Pb, Triton 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Perseptif Partnership dan kolektivitas*. Oryza : Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2010 . *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sarjono, Yetty.2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan :Pendekatan Kualitatif*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Stice & Skousen.2007. *Akuntansi Keuangan*, Edisi Enam Belas, Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2013, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.dan R&D*. Bandung : Alfabeta .

Soedjadi. 2000. Kiat Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

JURNAL

Rasyiid Tri Laksono : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Jufita Puspa Sari ,Rumzi Samin ,Ramadhani Setiawan : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Tanjungpinang (Studi Pada Wilayah Pasar Kelurahan Tanjungpinang Kota).

Mardiani, Suhaimi, Teuku muttaqin Mansyur 2018 : Peranan satuan polisi pamong praja dalam menata dan membina pedagang kaki lima di banda Aceh.

Widi Astuti Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Tahun 2010-2012.

Arlinda Miranti, Dyah Lituhayu Evaluasi Program Penataan Pedagang kaki lima di kabupaten Tegal

WEBSITE

Aguswan (<https://www.hetanews.com/user/139/aguswan>)

<http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015 Tentang pengelolaan pasar

Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi


Peraturan Walikota nomor 12 tahun 2015 tentang penggelolahan pasar daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DETI PRATIWI
Tempat/Tanggal Lahir : TEBING TINGGI, 2 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : JL. Sei padang, Tebing Tinggi
Anak Ke- : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Nama Orangtua
Ayah : CHAIDIR
Ibu : LISTIANI
Pendidikan
1. SD Negeri 165719 Tebing Tinggi : Tahun 2003 - 2009
2. SMP Negeri 3 Tebing Tinggi : Tahun 2009 - 2012
3. SMA Negeri 3 Tebing Tinggi : Tahun 2012 - 2015
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2015 - 2019

Medan, Maret 2019

Penulis


DETI PRATIWI
1503100062

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Deti Pratiwi

NPM : 1503100062

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih Dalam Rangka Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir kota Tebing Tinggi.

Daftar Pertanyaan :

Adanya tujuan pelaksanaan program kerja pasar bersih .

- Apa saja yang menjadi faktor pelaksanaan program pasar bersih terhadap para pedagang kaki lima?
- Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi?
- Apakah kinerja Satpol PP dapat mencapai rencana yang di harapkan dalam pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing Tinggi?
- Apakah masyarakat kota Tebing Tinggi dapat mendukung dalam pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing Tinggi?

Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam melaksanakan program kegiatan

- Bagaimana proses pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka penertiban PKL kota Tebing Tinggi?
- Apa saja kendala yang di alami dalam proses pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing Tinggi?
- Apakah ada rancangan sebelum membuat tata cara pelaksanaan (prosedur) program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi ?
- Apakah proses pelaksanaan program pasar bersih yang dilaksanakan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kota Tebing Tinggi?

Adanya rencana sesuai dengan pelaksanaan.

- Apakah pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan pemerintah kota Tebing Tinggi?
- Apa saja yang menjadi kendala pemerintah kota Tebing Tinggi dalam penertiban PKL di pasar Gambir kota Tebing Tinggi?
- Apa saja yang di lakukan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam rencana yang sudah di tentukan guna pelaksanaan program pasar bersih ?
- Apa saja harapan dari rencana Pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir Kota Tebing Tinggi?

Adanya kinerja

- Bagaimana kinerja pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih ?
- Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program pasar bersih di pasar Gambir kota Tebing Tinggi?
- Bagaimana respon PKL dan masyarakat kota Tebing Tinggi melihat kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program pasar bersih kota Tebing Tinggi?
- Apakah kinerja Satpol PP sudah maksimal dalam melaksanakan tugas pemerintah kota dalam pelaksanaan program pasar bersih Kota Tebing Tinggi?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar diabaikan
jika dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1-

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Medan, 12 Desember 2019
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Dedi Pratiwi
N.P.M : 1503100062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,52

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Status
1	Efektifitas pelaksanaan program pasar bersih dalam rangka Penertiban Pedagang kaki Lima di Kantor Satpol PP Tebing Tinggi	ada
2	Pengaruh kepemimpinan Camat terhadap prestasi kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Rambatan kota Tebing Tinggi	
3	Efektifitas Program dana bantuan operasional Sekolah (Bos) dalam rangka meningkatkan prestasi siswa di SDI 164827 kota tebing tinggi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, 12 Desember 2019

Ketua,

[Signature]

Pemohon,

(Dedi Pratiwi)

Pembimbing : Syarifuddin

10.054



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.054/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal 12 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DETI PRATIWI**
 N P M : 1503100062
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh) Tahun 2018/2019
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH
 DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
 KANTOR SATPOL PP TEBING TINGGI**
 Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 12 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 06 Rabiul Akhir 1440 H
 14 Desember 2018 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Deti Pratiwi
NPM : 1502100062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.254/SK/II.3/UMSU-03/E/2018.. tanggal 12 Desember 2018.. dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI UMA DI KANTOR SATPOL PP
KOTA TEBING TINGGI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui:
Pembimbing

(SYAFRUDDIN, S.oss., M.H...)

Pemohon,

(Deti Pratiwi)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 021/KEP/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019
W a k t u : 08.00 WIB s/d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	WIDYA RAMADHANI	1503100038	BANGUN NAPITUPULU, Drs.,M.AP.	A. Hidayah DLT, Drs, H, M.Si	PENGARUH MUTASI DAN PROMOSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
2	NADIA YUNITA	1503100088	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	Dr. LEYLIA KHAIRANI.	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR
3	DESSY SUHARTI MALA	1503100087	LEYLIA KHAIRANI, Dr.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENINGKATKAN STANDART MUTU SEKOLAH DI SMAN 1 KEJURUAN MUDA ACEH TAMIANG
4	DETI PRATIWI	1503100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KANTOR SATPOL PP TEBING TINGGI
5	ANDINI UTAMI ASRI	1503100042	R. KUSNADI, Drs.,M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
09 Januari 2019 M

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Drs. ZULFAHM, M.I.Kom.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dedi Pratiwi
 NPM : 1503100062
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas pelaksanaan program pasar borch dalam rangka pemberian Pedagang kaki lima di pasar Gambin kota Tebing Tinggi.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20.1.19	- Perbaiki tulisan dan kata-kata - Perbaiki isi rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2.	24.1.19	- Perbaiki cara penulisan dan bab II	<i>[Signature]</i>
3.	27.1.19	- Perbaiki penyusunan plotok penulisan dalam bab. III - Lengkapi data nama sumber - Perbaiki kembali pengumpulan data	<i>[Signature]</i>
4.	2.2.19	Atau bab. I, II dan III	<i>[Signature]</i>
5.	20.2.19	- Perbaiki kembali data nama sumber pada Bab. IV	<i>[Signature]</i>
6.	26.2.19	- Perbaiki isi simpulan pada Bab V - susunlah dan jumlah pertanyan - Perbaiki kembali pras kutipan (4,3,3,4 cm)	<i>[Signature]</i>
7.	3.3.19	- Lengkapi abstrak, daftar isi, surat pengantar dan silangsi pengantar skripsi.	<i>[Signature]</i>
8.	6.3.19	- Ator Pemb. skripsi siap untuk diujikan dan sidang penguji ujian	<i>[Signature]</i>

Medan, ...06...03...2019.

Dekan,

[Signature]
 (R. Anthoni S.Pd, S.Sos, M.Pd)

Ketua Program Studi,

[Signature]
 (Nala Khairiah S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : .I.

[Signature]
 SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Rueng LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
36	DETI PRATIWI	1503100052	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH DALAM RANGK PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GAMBIR KOTA TEBINGTINGGI
37	ANDINI UTAMI ASRI	1503100042	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MEDAN
38	SUCI HANDAYANI	1503100126	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP PRESTASI PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
39	RONI SETAWAN	1503100131	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Drs. R. KUSNADI, M.AP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
40	AULIA FITRIA SUCI	1503100090	Drs. R. KUSNADI, M.AP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2016 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

Notulis Sidang :

1.



Ditetapkan oleh :
Rektor
Dr. SULHAIMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 04 Rajab 1440 H
11 Maret 2019 M

Ketua,
Dr. ARIFIN SAUHEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

Nomor : 100/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Lampiran : --

Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Jumadil Awal 1440 H

28 Januari 2019 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Perdagangan
 UPTD Pasar Tebing Tinggi

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DETI PRATIWI**

N P M : 1503100062

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PASAR BERSIH
 DALAM RANGKA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
 PASAR GAMBIR KOTA TEBING TINGGI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

: File.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PASAR

JALAN MT. HARYONO KEL. PASAR GAMBIR KEC. TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, 14 Februari 2019

Nomor : 510/03/0 /Disdag/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Schubungan dengan surat izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perihal permintaan data Pedagang Kaki Lima di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Deti Pratiwi
NPM : 1503100062
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademi 2018/2019
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Pasar Bersih Dalam Rangka Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi

Demikian surat izin penelitian ini kami buat, agar kiranya dapat dipergunakan dengan sebaiknya.

PL. KEPALA UPTD PASAR
KOTA TEBING TINGGI



ERWIN J.H SITORUS, SE
PENATA MUDA
NIP. 19760221 201412 1 002